



# **LAPORAN TRIWULAN IV KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANTIBUM DAN LINMAS**

TAHUN ANGGARAN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TAHUN 2024**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

- b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :
- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
  - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 358.984.300,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 2,93 % (dua koma sembilan puluh tiga) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
	JUMLAH		%					
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	358.984.300,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

a. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa dari elemen masyarakat, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1315/SATPOL.PP-B tanggal 11 Oktober 2024, dilaksanakan pada hari Jum'at, 11 Oktober 2024 dalam rangka Deteksi Dini pada Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

#### **Hasil Kegiatan :**

- a) Melakukan koordinasi dengan semua tim kegiatan Pada Kegiatan Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat dan Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini PPD dan KUK Polres dan Kodim untuk melakukan antisipasi potensi gangguan Trantibum.
- b) Hasil temuan di lapangan :
  - Pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalbar Jl. Jendral Sutan Syahrir Kec. Pontianak Selatan Prov. Kalbar, tidak jadi dilaksanakan Pada Kegiatan Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat yang rencana diikuti ± 100 orang.

- c) Sampai dengan selesainya Pada Kegiatan Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun selama aksi damai berlangsung
- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1323/SATPOL.PP-B tanggal 14 Oktober 2024, dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 dalam rangka Deteksi Dini pada Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Melakukan koordinasi dengan semua tim kegiatan Pada Kegiatan Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat dan Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini PPD dan KUK Polres dan Kodim untuk melakukan antisipasi potensi gangguan Trantibum.
- b) Hasil temuan di lapangan :
- Aksi unjuk rasa dari Aliansi masyarakat Sipil peduli Demokrasi kalbar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat berlangsung di depan Kantor edukasi tersebut pada Senin
  - Pengunjuk rasa meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak netral dan berpolitik praktis ikut serta kampanye.
  - Koordinasi aksi Hafiz Azhari menyampaikan orasi pernyataan bahwa Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam UU a quo ASN berperan di pemilu itu harus memiliki sikap netralitas, integritas dan pemberian pelayanan efektif kepada masyarakat agar pemilu yang dijalankan itu lancar. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 terkait ASN disebutkan bahwa dalam proses pilkada, ASN merupakan anggota pemerintahan yang memiliki asas untuk tidak boleh terlibat dengan anggota ataupun staf dari partai politik yang sedang melaksanakan kampanye jelang pilkada.

Dengan rentetan uraian diatas, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi dengan membawa sepucuk kertas berisi beberapa petitem untuk disampaikan dan diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat.

- Tuntutan Aksi Demo :
  - a. Menuntut Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kalimantan Barat Rita Hastarita, S.sos., M.Si. untuk segera turun dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat.
  - b. Menuntut seluruh ASN dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat untuk tidak mengikuti langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat.
  - c. Stop memberikan ruang dan fasilitas kampanye ke setiap paslon peserta Pilkada
- c) Sampai dengan selesainya Pada Kegiatan Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun selama aksi damai berlangsung
- 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1366/SATPOL.PP-B tanggal 21 Oktober 2024, dilaksanakan pada hari Senin, 21 Oktober 2024 dalam rangka Deteksi Dini pada Aksi Demo Koalisi Transisi Energi bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memperingati hari *Big Bad Biomass International Day*, sebagai Korlap Alfian.

Jumlah masyarakat yang melakukan aksi tersebut sebanyak  $\pm$  40 orang.

**Laporan Kegiatan :**

- a. Adapun yang tergabung Koalisi Transisi Energi sebagai berikut :
  - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Pontianak
  - Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Pontianak
  - Himpunan Mahasiswa Ipmu Politik (Himapol) Untan
  - Himpunan Mahasiswa Ilmu Sosiologi (HMS) Untan
  - Link-AR Borneo
  - LBH Pontianak

- Sampan Kalbar
  - Masyarakat Petani Okan Hilir
  - Perwakilan Agra
  - Bumi inisiatif
  - IAIN
  - Walhi Kalbar
  - Kader Hijau Muhammadiyah
  - AGRA Kalbar
- b. Alat peraga sebagai berikut :
- Megaphone
- c. Spanduk bertuliskan :
- Big bad Biomassa internasional day, biomassa solusi palsu transisi energi
- d. Pamflet bertuliskan :
- Bioenergi distroys biodiversity
  - Biomassa hanya bayangan semu dari transisi energi
  - Rezim baru deforestasi baru
  - Babat rimba tanam akasia
  - End mayawana persada
  - Hentikan perampasan tanah rakyat berkedok transisi energi
  - Biomassa menghancurkan hutan kita
  - Cabut izin PT Mayawana Persada
  - Kami adalah kabar buruk bagi pengusaha
  - Biomassa energi bersih, biomassa energi kotor
  - Awas krisis iklim didepan mata
- e. Rangkaian kegiatan :
- Pukul 08.30 Wib massa aksi mulai berkumpul di Pobu Untan Jln. Moch Isa Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara
  - Pukul 09.45 massa aksi bergerak menuju bundaran Digulis Untan dilanjutkan Orasi secara bergantian
  - Pukul 10.20 massa aksi melaksanakan long mars menuju kantor Gubernur Kalbar Jln. Jenderal A Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara

- Pukul 10.40 Wib massa aksi tiba dikantor Gubernur Kalbar dilanjutkan Orasi secara bergantian
- Pukul 11.00 Wib massa diterima oleh :
  - Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Adi Yani, M.H.
  - Kabid KUK Satpol PP Prov. Kalbar Ismep Hardinata
  - Rudi Haryanto
- Penyampaian dari Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Adi Yani, M.H :
  - Saya juga sekarang merangkap sebagai Plh. Kepala Dinas perindustrian perdagangan dan SDM, tentu ini berkenaan dan apa yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan yang tergabung dalam Biomassa internasional day;
  - Tentunya kita sama-sama mendukung program pemerintah berkenaan bagaimana melestarikan hutan di Kalimantan Barat, perlu kami jelaskan Kalbar ini memiliki 14 juta hektar dan 8 juta itu adalah salah satu hutan yang harus kita pertahankan, dari 8 juta hektar sekarang harus moratorium perizinan di bidang kehutanan atau PPH, namun kami juga sudah membuat 12 izin untuk PBPH tapi bukan untuk HTI, untuk menebang tapi mempertahankan dengan jasa lingkungan bagaimana mereka mempertahankan hutan kembali dan tidak ditebang, ini juga pasti kita pahami Bersama;
  - Kemudian dari 8 juta hektar ada 68 izin kehutanan atau HTI, ada 254 ijin yang mempunyai peta indikatif seluas 1,6 juta, di Kalimantan Barat, ini sudah berizin paling banyak di Indonesia, ada 6.000 hektar dari 6.000 hektar ini ada yang namanya hutan adat yang akan dilestarikan untuk menjadikan peresapan diwilayah Kalbar;
  - Yang sudah mempunyai 20 izin kehutanan sosial yaitu hutan adat dan terbanyak lagi di Indonesia di Kalimantan itu hanya ada satu atau dua karakter, ada 20 dan sekarang kami sedang mempersiapkan 5 aset hutan adat di Kalimantan Barat;

- Perlu diinformasikan juga ke kawan-kawan sekalian bahwa kami bekerja tidak sendiri tapi bekerja dengan kawan-kawan seperti Walhi, lingkaran Borneo dengan institut dayakologi tapi sudah beberapa kesepakatan dan kami dibantu mempersiapkan perencanaan terutama hutan;
- Kemudian tentunya bagaimana kita memanfaatkan hutan yang ada adalah berkaitan dengan karbon, manfaat karbon itu yang kita kedepankan tadi sudah kita sampaikan ada program dari pemerintah pusat untuk mempertahankan hutan dengan nama full matching 2030 agar Kalimantan Barat juga terlibat langsung untuk mempertahankan hutan dan alhamdulillah ada dokumen yang pertama kita berikan kepada Menteri LHK di Jakarta;
- Kemudian tentu berkenaan dengan bagaimana energi terbaru bahwa caranya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat, terutama sumber daya air, kami sekarang sedang mendorong dua lokasi untuk energi listrik dengan sumber daya air di Kabupaten Sintang dan kabupaten Kapuas Hulu, dengan kapasitas Listrik;
- Satu hal lagi, kami sedang memproses membahas ini mungkin hal yang baru, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam lainnya yaitu sampah, sampah juga bisa jadi alternatif kita sama-sama membuat kajian beberapa besar sampah yang ada di Kalimantan Barat untuk energi terbaru;
- Kemudian dari tanaman-tanaman hutan yang tentunya tanaman hutan pun ada aturannya tidak semua tanaman hutan ditebang kemudian dia bisa dilakukan untuk bekerja tentunya terkena dengan hutan yang ditanam mereka hutan tanaman industri mereka punya rencana kegiatannya di situ mereka bisa datang itu mereka menanam kembali dari sisa-sisa tebangan tersebut ada 20% untuk dimanfaatkan sebagai biomassa, tapi karena adik-adik dan kawan-kawan sekalian secara memberi apresiasi tentang itu akan kita kaji bersama, kita akan memberikan masukan ini bersama-sama kepada Kementerian, ini ada dua Kementerian

sekarang, tapi Menteri kehutanan dan Menteri Lingkungan hidup, oleh karena itu kami mengapresiasi atas apa yang kawan-kawan sekalian sampaikan di sini

- Pukul 11.15 Wib perwakilan massa aksi menandatangani dokumen Tolak Biomassa dalam rencana transisi energi di Kalbar;
- Pukul 11.25 Wib massa menyerahkan dokumen Tolak Biomassa dalam rencana transisi energi di Kalbar kepada Kadis LHK Prov. Kalbar, Ir. Adi Yani, M.H.
- Pukul 11.30 Wib Aksi damai selesai dalam keadaan aman dan lancar selanjutnya massa meninggalkan kantor Gubernur Prov. Kalbar

b. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Rangkaian Kegiatan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1280/SATPOL.PP tanggal 2 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 terkait Kegiatan Kampanye Dialogis Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Aming Coffee Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Kampanye Dialogis dihadiri oleh Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor urut 2 yaitu Bapak Krisantus Kurniawan;
- b. Dalam acara Ekspresi Semangat Baru kami mengajak Anda untuk menyatu dalam harmoni kebahagiaan, berbagi tawa, dan menghidupkan semangat yang lebih segar untuk hari-hari yang akan datang. Tak hanya menikmati suasana hangat di Aming Coffee, kami juga mempersembahkan \*cek kesehatan gratis\* sebagai bentuk peduli kami terhadap kesehatan Anda, karena tubuh yang sehat adalah awal dari semangat yang tak terbatas. Dan tentu saja, hiburan seru yang akan menemani setiap momen Anda, dipadukan dengan kesempatan mendapatkan \*doorprize\* menarik!.

- c. Kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Di Caffe Podomoro tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1463/SATPOL.PP tanggal 13 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 terkait Kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat:

**Hasil Kegiatan :**

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP, Polres, Kodim Pontianak Provinsi Kalimantan barat.
- b) Hasil temuan di lapangan :
- Calon Gubernur Nomor urut 01 melakukan kampanye dialogis di daerah pasar tengah dan banyak masyarakat yang antusias dengan kehadiran calon gubernur pasangan 01. Calon Gubernur Nomor urut 01 tersebut memaparkan beberapa program kerja yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2025-2030;
  - Kampanye dialogis tersebut dilakukan dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan banyak relawan yang mengawal pasangan tersebut pada waktu dialog dengan masyarakat di sekitar pasar lawas di tengah kota pontianak tersebut dengan membagikan kaos pasangan no urut 01 dan berbelanja makan dan langsung di bagikan kepada masyarakat di psar tengah;
- c) Pada Kegiatan kampanye dialogis di pasar tengah tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

- 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1352/SATPOL.PP tanggal 18 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 terkait Kegiatan Simulasi Pilkada *Night Run* bertempat di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Kegiatan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dengan tujuan melihat bagaimana atensi masyarakat terhadap pilkada yang akan diselenggarakan mendatang.
  - b) kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 oktober 2024 mulai pukul 18.00- 22.00 WIB, bertempat di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak yang akan diikuti  $\pm$  1000 peserta.
  - c) Rute lari 5 km start Stadion SSA - Jl. MT. Haryono - Jl. M.Sohor - Jl. Letjen. Sutoyo - Jl. A.Yani - Jl. Sultan Abdurrahman - Jl. Ks. Tubun - Jl. Subarkah - Jl. M. Sohor - Jl. MT. Haryono - Stadion SSA (finish).
  - d) Untuk pengamanan satpolpp,terdapat 2 (dua) station water yaitu Area Depan Masjid Mujahidin dan Area Kantor KPU Prov. Kalbar serta Area Start/ Finish Stadion Sultan Syarif Abdurrahman.
- 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1370/SATPOL.PP tanggal 22 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 terkait Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bertempat di Hotel Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya;

**Hasil Kegiatan :**

Pada hari Rabu 23 Oktober 2024 pukul 19.00 Wib bertempat di Qubu Resort Jln. Arteri Supadio No 16 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah berlangsung Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024,yang di ikuti  $\pm$  250 orang.

- a) Hadir dalam kegiatan sebagai berikut :
  - Ketua KPU Prov Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi
  - Ketua Bawaslu Prov Kalbar, Mursyid Hidayat

- Pj. Gubernur Kalbar diwakili Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kalbar, Zamroni, S.STP.,M.Si
- Pangdam XII/Tpr diwakili Waasintel Letkol Inf Alim Mustofa.
- Kapolda Kalbar diwakili Dirintelkam Polda Kalbar, Kombes Pol Munizar, S.I.K.,M.H
- Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dan Irjen Pol (Pum) Dr. Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H.
- Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dan Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si
- Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan, S.H. dan Ir. Jakius Sinyor
- Kejati Prov Kalbar diwakili Asintel kejati kalbar, Taliwondo, S.H.,M.H
- Danlantamal XII/Pontianak diwakili Paban ren sintel, Letkol laut (KH) Jenius Patabang
- Kabinda Prov. Kalbar diwakili KBO Kolonel Cpl Suwadi, S.E.,M.E
- Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Kalbar
- Para Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalbar
- Tamu Undangan

b) Susunan acara sebagai berikut :

- Pembukaan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Jingle Pilkada 2024.
- Sambutan sekaligus membuka debat publik oleh Ketua KPU Prov. Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi :
  - Pada hakikatnya debat publik ini adalah forum silaturahmi pasangan calon gubernur dan warga masyarakat Kalimantan Barat khususnya para pemilih yang berjumlah hampir 4 juta orang.
  - Kami berharap dapat menyaksikan debat publik ini setidaknya tokoh-tokoh penting yang berada di seluruh wilayah Kalimantan Barat dapat mengetahui ide dan gagasan yang ada pada pasangan calon yang telah dituangkan melalui visi misi dan program yang pada hakikatnya dengan dinamika dengan komunikasi dengan silaturahmi baik secara langsung di ruangan ini

maupun yang menyaksikan di siaran televisi radio melalui media sosial akan mendapatkan preferensi yang cukup punya kepercayaan yang tinggi untuk nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk itu dengan cara yang bergembira dan bertanggung jawab memanfaatkan kekuasaannya untuk menentukan masa depan Kalimantan Barat.

- Oleh karena itu forum ini menjadi forum yang penting dan luar biasa tidak sekedar kontestasi tapi pasangan calon gubernur yang terhormat ini mendapat ruang yang terbuka untuk menyampaikan ide dan gagasannya di ruang ini, marilah kita saksikan bersama-sama.
  - Kepada para hadirin kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan kami berusaha untuk menyajikan yang terbaik buat warga masyarakat Kalimantan Barat, Saya berharap ridho Allah Tuhan yang maha kuasa marilah kita berdoa menundukkan kepala dengan rasa takdim.
- c) Pembacaan tata tertib oleh Moderator.
- d) Penyampaian Visi, Misi dan Program pasangan calon.
- H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dan Irjen Pol (Pum) Dr. Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H.

Visi : Tuntasnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalimantan Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Misi :

- Memperkuat pondasi transformasi sosial, yaitu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.
- Memperkuat pondasi transformasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produktivitas ekonomi, iptek, inovasi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan

global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

- Memperkuat pondasi transformasi tata kelola, yaitu melakukan penataan terhadap regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
  - Mewujudkan supremasi hukum, stabilitas, yaitu dengan melaksanakan hukum yang berkeadilan, menjaga keamanan, melaksanakan demokrasi substansial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro.
  - Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu dengan menjaga kerukunan umat beragama, melestarikan kebudayaan, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
  - Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
  - Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  - Mewujudkan kesinambungan pembangunan.
- Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dan Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.  
VISI : Terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

Misi :

- Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
- Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip good governance dan good government.

- Mewujudkan kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.
  - Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal.
  - Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera.
  - Memberikan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesejahteraan gender.
  - Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA).
  - Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.
- Muda Mahendrawan, S.H. dan Ir. Jakius Sinyor :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Menanjak Bahagia

Misi :

- Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance).
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan (sustainable).
- Meningkatkan kemandirian perekonomian melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
- Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pembangunan.
- Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya, serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

- e) Pendalaman Visi, Misi dan Program oleh Moderator.
  - f) Tanya Jawab dan Sanggahan antar Pasangan Calon.
  - g) Penutup.
- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1385/SATPOL.PP tanggal 25 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 terkait Kegiatan Gebyar Pengawasan Partisipatif Bawaslu Dalam Rangka Pemilihan Serentak;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP, dan Tim Adpim Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan tersebut.
- b) Hasil temuan di lapangan :
  - Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Hukum Dan Politik Dra. Natalia Karyawati, M.E dan Ketua Bawaslu Kalbar Bp. Mursyid Hidayat, S.Sos. dihadiri oleh :
    - Komandan Satbrimob Polda Kalbar Kombespol Irwan Jaya
    - Danlanal Kalbar
    - Kajati Prov. Kalbar
    - Pangdam XII/ Tpr yang mewakili Perwira Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Kol. Inf Subar, S.Pd., M.Si
    - Ketua Bawaslu dan anggota Kab/ Kota se-kalbar
- c) Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan minggu, tanggal 27 oktober 2024 mulai pukul 06.00 wib hingga selesai di Halaman Kantor Gubernur sebanyak 500 orang.
- d) Jalur jalan sehat : Kantor Gubernur Kalbar - Jalan Ahmad Yani - Tugu Digulis - Jalan Hadari Nawawi - Jalan Sepakat 2 - Jalan Ahmad Yani - Kantor Gubernur Kalbar
- e) Pada pukul 11.00 WIB kegiatan jalan sehat selesai.

- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1472/SATPOL.PP tanggal 18 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 terkait Kegiatan Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

Pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 19.30 Wib bertempat di Kalimantan Ballroom Lt. 5 hotel Aston Jln. Gajah Mada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, telah dilaksanakan kegiatan Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 dengan tema "Menyelaraskan Kebijakan Dibidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih", dihadiri ± 400 orang

a) Adapun yang hadir antara lain :

- Kajati Prov. Kalbar diwakili Asintel Kejati Prov. Kalbar Bpk. Taliwondo, S.H., M.H.
- Ketua DPRD Prov Kalbar, Minsen S.H
- Danlanud Supadio diwakili Kadisops Lanud Supadio Kolonel Pnb I Gusi Ngurah Adi Brata
- Dan Lantamal XII Pontianak diwakili Danunit Teknis Intel Lantamal XII Kapten Laut (P) Agus Safruddin
- Kabinda Kalbar diwakili Kaposda Pontianak Arif Rahmat
- Ketua KPU Prov. Kalbar Bpk. M. Syarifuddin Budi, S.T beserta Komisioner dan Sekretaris
- Ketua Bawaslu Prov. Kalbar, Mursyid Hidayat S.Sos
- Calon Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 01 Bpk. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum-Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H.
- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 02 Bpk. Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H-Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 03 Bpk. Muda Mahendrawan, S.H. M.Kn-Ir. Jakius Sinyor.

- Para Ketua pengurus Partai Pengusung dan Pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

b) Susunan acara sebagai berikut :

- Pembukaan.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Jingle Pilkada.
- Sambutan Ketua KPU Prov Kalbar Bpk. M. Syarifuddin Budi, S.T :
  - Bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya kita pada malam hari ini tetap diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam silaturahmi besar warga Kalimantan Barat yang dikemas dalam kampanye debat publik Ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar;
  - Sungguh suasana malam hari ini sangat menggembirakan kami menghormati dan sungguh berterima kasih atas kehadiran bapak Ibu mewakili masyarakat Kalimantan Barat, terkhusus kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan masyarakat yang menyaksikan melalui layar televisi dan media sosial, penyampaian ide dan gagasan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh calon pemimpin kita, sesungguhnya adalah visi, misi dan program yang pada akhirnya akan dituangkan dalam program-program pembangunan untuk 5 tahun ke depan Kalbar;
  - Kami membagi dalam beberapa fase dan ini fase terakhir dari debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang pada malam hari ini mengambil tema Penyelarasan Kebijakan di bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
  - Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi, kami senang dengan suasana yang gembira pada malam hari ini menunjukan kita punya komitmen yang tinggi dan luar biasa, tidak hanya disaksikan oleh publik di Kalimantan Barat, kita disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat penting patut kita syukuri menunjukkan keadaan politik yang bisa hadirkan di

wilayah Kalimantan Barat dan setingkat lebih maju, setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia;

- Selibuhnya silahkan nikmati debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pada malam hari ini, kita bisa menyaksikan debat dapat berlangsung yang gembira dan berlangsung hikmah, mari kita berdoa memohon Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga perhelatan dalam rangka pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat dapat terlaksana dengan suasana yang tertib, aman dan direncanakan oleh KPU dan jajarannya dengan berintegritas, kami izinkan saya untuk memimpin doa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam debat publik ketiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024 telah dilakukan pengamanan oleh :

- Polda Kalbar
  - Sat Brimob Polda Kalbar
  - Dit Samapta Polda Kalbar
  - Sat PAM Obvit Polda Kalbar
  - Kodim 1207/Pontianak
  - Dishub Prov. Kalbar
  - Satpol PP Prov. Kalbar
- 7) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1517/SATPOL.PP tanggal 26 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 terkait Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka deteksi dini potensi gangguan trantibum pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yaitu Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota Tahun 2025 – 2030;

- b) Terpantau masyarakat antusias ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati Nurani memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Walikota dan Bupati se-Kalimantan Barat;
  - c) Pada Kegiatan Pemantauan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
- 8) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1556/SATPOL.PP tanggal 6 Desember 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pada Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 mulai pukul 09.00 wib hingga selesai di Lt. 9 Hotel Mercure Pontianak dipimpin oleh Ketua KPU Prov. Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi beserta Sekretaris dan anggota diikuti sebanyak 300 orang undangan diantaranya :
  - Ketua dan Anggota KPU 14 kab/kota se-Kalbar beserta Sekretaris dan Kasubbag;
  - Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Kalbar serta Ketua Bawaslu 14 kab/ kota se-kalbar atau yang mewakili;
  - Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat;
  - Dinas / instansi Provinsi Kalimantan Barat;
  - Saksi dari 3 Paslon Gubernur dan wakil gubernur;
  - Pemantau.

b) Laporan kegiatan :

- Adanya kekeliruan perhitungan suara di Kab. Melawi yakni kelebihan 4 suara pemilih terdiri dari 1 suara di TPS 12 desa Paal ktp asal kkr, 3 suara di TPS 10 desa Tanjung Niaga 2 ktp asal ptk 1 ktp asal kkr, tapi akhirnya disepakati dan bisa disahkan.
- Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 14 Kab/ Kota selesai dan disahkan diakhiri dengan ditandatangani berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 oleh Ketua KPU Provinsi Kalbar bersama 3 saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat.
- Total hasil akhir perolehan Suara :
  01. Pasangan H. Sutarmidji - H. Didi Haryono sebanyak 963.453 suara.
  02. Pasangan H. Ria Norsan - Krisantus Kurniawan sebanyak 1.364.563 suara.
  03. Pasangan calon Muda Mahendrawan Jakius Sinyor sebanyak 256.530 suara.

c) Pada Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

c. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Larangan Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1550/SATPOL.PP tanggal 5 Desember 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 bertempat di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak;

- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1551/SATPOL.PP tanggal 6 Desember 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 7-8 Desember 2024 bertempat di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Sebelum dilakukan penertiban untuk pengosongan kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak yang ditempati para PKL untuk berjualan, telah dilakukan Sosialisasi pengosongan oleh Pihak Rektorat Untan bersama dengan Dinas/Instansi terkait pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024;
- b) Surat pemberitahuan pengosongan sebanyak  $\pm$  300 lembar dibagikan kepada para PKL dan harus mengosongkan tempat jualan tersebut paling lambat tanggal 4 Desember 2024;
- c) Pada tanggal 6 Desember 2024 Tim Rektorat Untan Pontianak Bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, TNI dan Polri melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan.

Hasil kegiatan :

- PKL yang berada di sepanjang Jalan M. Isa tepatnya di Depan Auditorium Untan ditertibkan dan direlokasi ke Jalan Daya Nasional tidak jauh dari lokasi penertiban;
- Proses relokasi/pemindahan/penertiban PKL diwarnai dengan adanya aksi Demo dari para PKL yaitu penolakan untuk mengosongkan tempat jualan dan dimediasi oleh Kapolresta didampingi Kapolsek Pontianak Selatan dan terjadi keributan / adu argumentasi antara PKL dengan para petugas;
- Disamping itu para pekerja menutup akses umum Jalan M. Isa yang berlokasi di depan Bank Kalbar Cabang Untan dengan pagar seng;
- Para PKL membongkar pagar seng yang menutup akses Jalan M. Isa Pontianak;

- Jaringan Listrik sedianya akan diputus, namun para pedagang telah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PLN dan tanggapan dari pimpinan bahwa jaringan Listrik tersebut aman / sah tidak ada pencurian Listrik sehingga tidak bisa diputus.
  - Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Instansi terkait melakukan pengamanan jalannya proses penertiban PKL;
- d) Pada tanggal 7 Desember 2024 Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan deteksi dini terkait keberadaan para PKL tersebut, dan hasil temuan di lapangan bahwa PKL kembali berjualan seperti biasa di sepanjang Jalan M. Isa dan terindikasi PKL tersebut semakin banyak dari biasanya.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	358.984.300,-	358.490.851,-	99,86 %

Sumber data : Realisasi Fisik per Desember 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 358.984.300,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan pada Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 358.490.851,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 99,86 % Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (seratus persen).

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum maksimal pembiayaan yang ada khususnya pembiayaan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Meskipun demikian kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Desember 2024

Mengetahui:

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19820814 200604 2 009

Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,

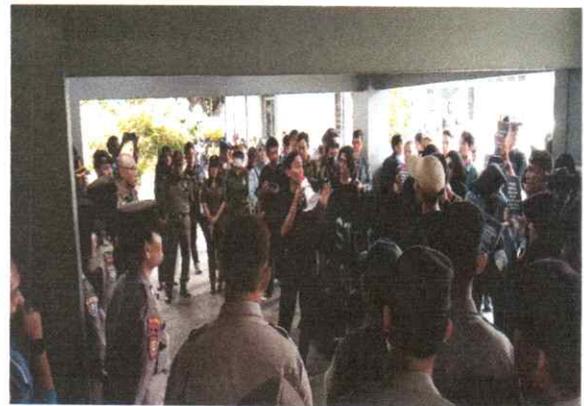


WAHYUDIN NUSA GUNAWAN

Penata Tk. I

NIP. 19740425 200701 1 013

## DOKUMENTASI KEGIATAN



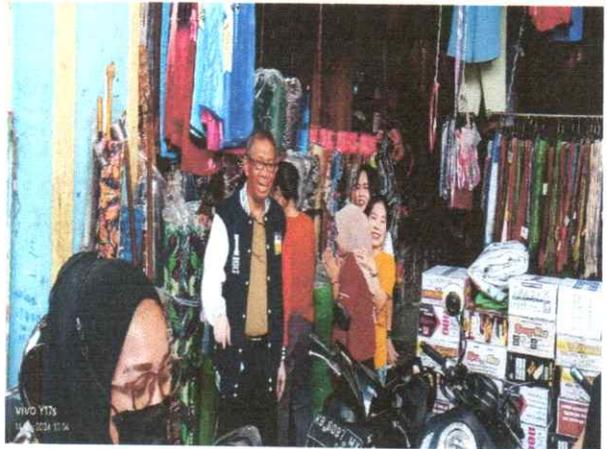
Aksi Unjuk Rasa / Demo dari Elemen Masyarakat



Pilkada Nigh Run



Debat Publik Pasangan Caloh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat



Kampanye Dialogis Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar



Gebyar Pengawasan Partisipatif Bawaslu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024





Penertiban PKL di Sepanjang Jalan Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak



**KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/ 1270 /SATPOL.PP-B Tanggal 30 September 2024	Selasa, 1 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.	SATPOL PP	10	Kantor Gubernur Kalimantan Barat
2	No. 300.1/ 1280 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Oktober 2024	Rabu, 2 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kampanye Dialogis Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Aming Coofee Podomoro Pontianak
3	No. 300.1/ 1291 /SATPOL.PP-B Tanggal 4 Oktober 2024	Minggu, 6 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan World Walking Day Tahun 2024	SATPOL PP	5	Gedung Dekranasda Kalimantan Barat
4	No. 300.1/ 1306 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Oktober 2024	Rabu, 9 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
5	No. 300.1/ 1315 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 Oktober 2024	Jumat, 11 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
6	No. 300.1/ 1323 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Oktober 2024	Senin, 14 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

7	No. 300.1/ 1352 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Oktober 2024	Sabtu, 19 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pilkada Night Run Tahun 2024.	SATPOL PP	10	Orang	Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak
8	No. 300.1/ 1353 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Oktober 2024	Minggu, 20 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Senam Jepin Massal Dalam Rangka HUT Kota Pontianak.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
9	No. 300.1/ 1354 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Oktober 2024	Jumat, 18 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Malam Ta'aruf Festival Melayu XIII Tahun 2024.	SATPOL PP	8	Orang	Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
10	No. 300.1/ 1366 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 Oktober 2024	Senin, 21 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Koalisi Transisi Energi.	SATPOL PP	10	Orang	Kantor Gubernur Kalimantan Barat
11	No. 300.1/ 1370 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Oktober 2024	Rabu, 23 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.	SATPOL PP	10	Orang	Hotel Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya
12	No. 300.1/ 1385 /SATPOL.PP-B Tanggal 25 Oktober 2024	Minggu, 27 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gebyar Pengawasan Partisipatif Bawaslu Dalam Reangka Pemilihan Serentak Tahun 2024..	SATPOL PP	7	Orang	Kantor Gubernur Kalimantan Barat
13	No. 300.1/ 1463 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 November 2024	Kamis, 14 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	7	Orang	Pasar Tradisional Pontianak

14	No. 300.1/ 1468 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 November 2024	Sabtu, 16 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Senam Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	9	Orang	Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak
15	No. 300.1/ 1472 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 November 2024	Senin, 18 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	10	Orang	Hotel Aston Pontianak
16	No. 300.1/ 1517 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 November 2024	Rabu, 27 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
17	No. 300.1/ 1550 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Desember 2024	Jum'at, 6 Desember 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Larangan Berjualan Bagi Pedagang Kali Lima di Sepanjang Jalan Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1/ 1551/SATPOL.PP-B Tanggal 6 Desember 2024	Sabtu-Minggu, 7-8 Desember 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Larangan Berjualan Bagi Pedagang Kali Lima di Sepanjang Jalan Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
19	No. 300.1/ 1556 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 Desember 2024	Minggu, 8 Desember 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2024	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak